



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARMI**
2. Jabatan : **CALON REKTOR**
3. NHK : **816184**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1855 m2/1855 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/392 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1793 m2/1793 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/196 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/380 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 215.000.000**

1. MOBIL, YARIS TOYOTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000



2. MOBIL, SEDAN HONDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	46.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	118.550.746
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.880.050.746
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.880.050.746

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.